



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

06 – 07 Maret 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

07 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Minggu, 06 Maret 2022	+
	MEDIA	https://keuangan.kontan.co.id/news/awal-maret-2022-penyaluran-dana-flpp-telah-mencapai-rp-224-triliun?page=all	
	JUDUL	Awal Maret 2022, Penyaluran Dana FLPP Telah Mencapai Rp 2,24 Triliun	
	NARASUMBER	Komisioner BP Tapera, Adi Setianto	
	RESUME	Geliat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) semakin menjanjikan. Buktinya, per 2 Maret 2022, penyaluran dana FLPP telah mencapai 20.327 unit atau senilai Rp 2,24 triliun. Dana tersebut telah disalurkan melalui 18 bank, 3.306 pengembang dan 4.361 perumahan di Indonesia. Selain itu, juga masih terdapat data tunggu yang masih belum dibayarkan sebanyak 5.129 unit senilai Rp 572,43 miliar. Penyaluran dana FLPP bulan Februari tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan hingga 20,5 kali lipat. Ini memperlihatkan optimisme yang tinggi dari pelaku pembangunan perumahan.	
2	TANGGAL	Minggu, 06 Maret 2022	+
	MEDIA	https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/03/06/rp-224-triliun-telah-mengucur-untuk-pembiayaan-perumahan-melalui-flpp?page=all	
	JUDUL	Rp 2,24 Triliun Telah Mengucur Untuk Pembiayaan Perumahan Melalui FLPP	
	NARASUMBER	Komisioner BP Tapera, Adi Setianto	
	RESUME	Pada awal Maret ini penyaluran dana FLPP telah mencapai 20.327 unit atau senilai Rp 2,24 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui 18 bank, 3.306 pengembang dan 4.361 perumahan di Indonesia. Selain itu, juga masih terdapat data tunggu yang masih belum dibayarkan sebanyak 5.129 unit senilai Rp 572,43 miliar. Sebanyak 18 bank penyalur 2022 yang telah menyalurkan dana FLPP dalam periode yang sama	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

07 / 03 / 2022

| Analisis Pemberitaan Media Online

	adalah BTN, BTN Syariah, BNI, BJB, Bank Sumsel, Bank Jambi, Bank Nagari, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar, Bank Nagari Syariah, Bank Sulsel, Bank Aceh, Bank Kaltim, Bank Sulteng, Bank Kalbar Syariah, Bank DKI dan Bank Jambi Syariah. Tahun 2021 penyaluran dana FLPP juga dimulai pada bulan Februari sebanyak 650 unit senilai Rp 69,79 miliar. Sedangkan pada Februari 2022, penyaluran dana FLPP ditutup pada (25/2) lalu sebanyak 13.345 unit senilai Rp 1,47 triliun.	
--	--	--



06 / 03 / 2022

Sumber: kontan.co.id

Awal Maret 2022, Penyaluran Dana FLPP Telah Mencapai Rp 2,24 Triliun

Reporter: Dina Mirayanti Hutaeruk
Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Geliat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) semakin menjanjikan. Buktinya, per 2 Maret 2022, penyaluran dana FLPP telah mencapai 20.327 unit atau senilai Rp 2,24 triliun.

Dana tersebut telah disalurkan melalui 18 bank, 3.306 pengembang dan 4.361 perumahan di Indonesia. Selain itu, juga masih terdapat data tunggu yang masih belum dibayarkan sebanyak 5.129 unit senilai Rp 572,43 miliar.

Sebanyak 18 bank penyalur 2022 yang telah menyalurkan dana FLPP dalam periode yang sama adalah BTN, BTN Syariah, BNI, BJB, Bank Sumsel, Bank Jambi, Bank Nagari, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar, Bank Nagari Syariah, Bank Sulsel, Bank Aceh, Bank Kaltim, Bank Sulteng, Bank Kalbar Syariah, Bank DKI dan Bank Jambi Syariah.

Pencapaian penyaluran dana FLPP pada Februari tahun 2022 ini memperlihatkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan penyaluran dana FLPP pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

Tahun 2021 penyaluran dana FLPP juga dimulai pada bulan Februari sebanyak 650 unit senilai Rp 69,79 miliar. Sedangkan

pada Februari 2022, penyaluran dana FLPP ditutup pada (25/2) lalu sebanyak 13.345 unit senilai Rp 1,47 triliun.

“Penyaluran dana FLPP bulan Februari tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan hingga 20,5 kali lipat. Ini memperlihatkan optimisme yang tinggi dari pelaku pembangunan perumahan,” ujar Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam keterangan resminya, Jumat (4/2).

Optimisme ini diharapkan Adi Setianto terus berlanjut hingga target penyaluran dana FLPP tahun 2022 bisa tercapai. Rencananya, minggu ke-2 Maret ini, BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) akan melakukan penandatanganan perjanjian kontrak kinerja dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kontrak kinerja menyangkut masalah layanan prima, akuntabilitas pengelolaan dana FLPP serta pengelolaan kinerja keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Adi Setianto menyadari pemerintah telah berupaya sepenuhnya untuk terus membuat pasar perumahan di Indonesia terus berkembang dengan baik. Ini terlihat dari perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). PPN DTP properti ini diperpanjang selama 9 bulan sepanjang tahun 2022.



06 / 03 / 2022

Sumber: kontan.co.id

Kelanjutan insentif PPN DTP properti tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.0110/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Rumah Susun yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022 lalu. Untuk proses tersebut, aplikasi Sikumbang yang terus dikembangkan oleh BP Tapera masih menjadi andalan yang digunakan oleh pemerintah untuk mendatanya.

Selain itu, Adi Setianto juga melihat pemerintah terus berupaya memudahkan urusan perizinan di sektor properti. Salah satunya dengan penerbitan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tanggal 25 Februari lalu.

Dalam surat edaran itu, pemerintah daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah

(perda) tentang retribusi PBG wajib menggunakan perhitungan retribusi itu dalam system informasi manajemen bangunan Gedung (SIMBG).

Adapun pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki perda tentang retribusi PBG untuk sementara dapat memakai penghitungan retribusi IMB ke dalam SIMBG.

"Kebijakan yang dikeluarkan ini menjadi jalan keluar untuk menghilangkan hambatan perizinan bagi pelaku pembangunan. Tentunya hal ini berdampak positif terhadap pembangunan rumah subsidi di Indonesia. Diharapkan pembangunan perumahan subsidi yang tadinya sempat terkendala bisa jalan kembali dengan tetap memperhatikan kualitas bangunan dan ketepatan sasaran," pungkas Adi.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/awal-maret-2022-penyialuran-dana-flpp-telah-mencapai-rp-224-triliun?page=all>



06 / 03 / 2022

Sumber: tribunnews.com

Rp 2,24 Triliun Telah Mengucur Untuk Pembiayaan Perumahan Melalui FLPP

Editor: Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
- Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus
mengucur.

Pada awal Maret ini penyaluran
dana [FLPP](#) telah mencapai 20.327 unit atau
senilai Rp 2,24 triliun.

Dana tersebut disalurkan melalui 18 bank,
3.306 pengembang dan 4.361 perumahan di
Indonesia.

Selain itu, juga masih terdapat data tunggu
yang masih belum dibayarkan sebanyak
5.129 unit senilai Rp 572,43 miliar.

Sebanyak 18 bank penyalur 2022 yang
telah menyalurkan dana FLPP dalam
periode yang sama adalah BTN, BTN
Syariah, BNI, BJB, Bank Sumsel, Bank
Jambi, Bank Nagari, Bank Riau Kepri
Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank
Kalbar, Bank Nagari Syariah, Bank Sulsel,
Bank Aceh, Bank Kaltim, Bank Sulteng,
Bank Kalbar Syariah, Bank DKI dan Bank
Jambi Syariah.

Pencapaian penyaluran dana [FLPP](#) pada
Februari tahun 2022 ini memperlihatkan
peningkatan yang signifikan jika
dibandingkan dengan penyaluran
dana [FLPP](#) pada bulan yang sama tahun
sebelumnya.

Tahun 2021 penyaluran dana [FLPP](#) juga
dimulai pada bulan Februari sebanyak 650
unit senilai Rp 69,79 miliar.

Sedangkan pada Februari 2022, penyaluran
dana FLPP ditutup pada (25/2) lalu
sebanyak 13.345 unit senilai Rp 1,47
triliun.

“Penyaluran dana [FLPP](#) bulan Februari
tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya
terjadi peningkatan hingga 20,5 kali lipat.

Ini memperlihatkan optimisme yang tinggi
dari pelaku pembangunan perumahan,” ujar
Komisioner [BP Tapera](#), [Adi Setianto](#) dalam
keterangan resminya, Jumat (4/2).

Optimisme ini diharapkan [Adi
Setianto](#) terus berlanjut hingga target
penyaluran dana [FLPP](#) tahun 2022 bisa
tercapai.

Rencananya, minggu ke-2 Maret ini, [BP
Tapera](#) selaku Operator Investasi
Pemerintah (OIP) akan melakukan
penandatanganan perjanjian kontrak kinerja
dengan Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kontrak kinerja menyangkut masalah
layanan prima, akuntabilitas pengelolaan
dana [FLPP](#) serta pengelolaan kinerja
keuangan yang efektif, efisien dan
akuntabel.

Adi Setianto menyadari pemerintah telah
berupaya sepenuhnya untuk terus membuat
pasar perumahan di Indonesia terus
berkembang dengan baik.

Ini terlihat dari perpanjangan insentif Pajak
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah



06 / 03 / 2022

Sumber: tribunnews.com

(PPN DTP). PPN DTP properti ini diperpanjang selama 9 bulan sepanjang tahun 2022.

Kelanjutan insentif PPN DTP properti tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.0110/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Rumah Susun yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022 lalu.

Untuk proses tersebut, aplikasi Sikumbang yang terus dikembangkan oleh [BP Tapera](#) masih menjadi andalan yang digunakan oleh pemerintah untuk mendatanya.

Selain itu, Adi Setianto juga melihat pemerintah terus berupaya memudahkan urusan perizinan di sektor properti.

Salah satunya dengan penerbitan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tanggal 25 Februari lalu.

Dalam surat edaran itu, pemerintah daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang retribusi PBG wajib menggunakan perhitungan retribusi itu dalam system informasi manajemen bangunan Gedung (SIMBG).

Adapun pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki perda tentang retribusi PBG untuk sementara dapat memakai penghitungan retribusi IMB ke dalam SIMBG.

“Kebijakan yang dikeluarkan ini menjadi jalan keluar untuk menghilangkan hambatan perizinan bagi pelaku pembangunan.

Tentunya hal ini berdampak positif terhadap pembangunan rumah subsidi di Indonesia.

Diharapkan pembangunan perumahan subsidi yang tadinya sempat terkendala bisa jalan kembali dengan tetap memperhatikan kualitas bangunan dan ketepatan sasaran,” pungkas Adi.

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/03/06/rp-224-triliun-telah-mengucur-untuk-pembiayaan-perumahan-melalui-flpp?page=all>